



## PEREMPUAN DALAM OLIGARKI, JEJAKNYA DI CERPEN INDONESIA

**Muhajir, Asrofah**

Universitas PGRI Semarang

[muhajir@upgris.ac.id](mailto:muhajir@upgris.ac.id), [asrofah@upgris.ac.id](mailto:asrofah@upgris.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini meneliti tentang oligarki dalam dua cerpen Indonesia berjudul “Hawa Panas” karya Silvester Petara Hurit dan “Rumah Amplop” karya Damhuri Muhammad. Oligarki adalah politik pertahanan kekuasaan dan kekayaan. Yang diteliti meliputi unsur, pola operasional oligarki, juga sumber kekuasaan individual para tokohnya. Penelitian ini juga membandingkan kedudukan perempuan pemimpin dalam sistem perpolitikan Indonesia dengan para tokoh perempuan yang terdapat di dalam cerpen. Hasil penelitian ini adalah adanya sistem oligarki di dalam dua cerita ini. Pada cerpen “Hawa Panas” oligarki yang memiliki sumber daya kekuasaan uang mengendalikan para elit yang lain, sedangkan dalam “Rumah Amplop” terlihat pertumbuhan dari elit birokrat menuju elit ekonomi dan kemudian menjadi oligark. Pola operasionalisasi semuanya predatoris dan menggunakan politik uang. Baik dalam dunia perpolitikan Indonesia maupun di dalam cerpen, dalam sistem oligarki perempuan tidak menjadi subjek utama oligarki. Dalam perpolitikan Indonesia, perempuan adalah pelanjut atau kepanjangan tangan bagi orangtua atau suami yang aktor utamanya, sedangkan dalam cerpen bertema oligarki, perempuan hanya sebagai alat bagi sistem oligarki. Perempuan menjadi pelanjut atau kepanjangan tangan bukannya tanpa nilai, seseorang dipilih menjadi pelanjut tentu saja karena dia memiliki nilai baik karena kemampuan juga popularitasnya.

Kata kunci: oligarki, perempuan, politik

### **PENDAHULUAN**

Pembicaraan tentang politik terdengar dimana-mana. Mulai politik lokal hingga politik nasional. Dari politik pemilihan kepala desa hingga pemilihan presiden. Apalagi menjelang pemilu. Rakyat diajak sibuk untuk membahas tentang politik, siapa yang paling baik dan layak untuk menempati kursi-kursi tertentu.

Demam politik itu muncul secara langsung menguasai ruang publik seperti baliho yang menampilkan para tokoh berikut janji-janjinya, bendera-bendera dipasang di pinggir-pinggir jalan, apalagi di media sosial. Para tokoh yang akan mencalonkan diri sebagai legislatif maupun eksekutif membangun tim khusus yang mengharap citra mereka yang dibentuk melalui media sosial. Para tim tersebut memproduksi media kampanye yang tidak hanya mengenalkan sang tokoh tetapi juga membangun citra yang akan ditanamkan kepada masyarakat. Produksi itu berupa gambar, video juga *caption* atau tulisan. Setelah diproduksi lalu disebar dan media yang paling efektif pada saat ini adalah media sosial karena banyak orang Indonesia memiliki akun media sosial. Disampaikan oleh Antony Mayfield (2008 via (Rully, 2018) bahwa media sosial mencakup beberapa karakter, seperti; (1) Partisipasi, (2) Keterbukaan, (3) Percakapan, (4) Komunitas, (5) Saling Terhubung. Maka sejalan dengan pendapat Matthew A. Baum & Tim Groelling bahwa para pengguna media sosial berpotensi menjadi opinion leader baru yang akan mendapatkan pengikutnya masing-masing (dalam Shahreza, 2016;163 melalui (Rully, 2018).



Dalam perhelatan politik dari tingkat desa hingga tingkat nasional itu dimana sebenarnya rakyat diletakkan? Mereka sesungguhnya pemegang kekuasaan yang sesungguhnya, tetapi pada banyak kasus mereka hanya digunakan dan dipertimbangkan saat proses pemilihan saja dan setelah itu ditinggalkan. Ibaratnya saat pemilihan mereka adalah raja tetapi setelah pemilu selesai mereka menjadi jelata. Foto-foto menunjukkan bahwa para tokoh ketika masih menjadi calon mendekati masyarakat jika perlu mencium tangannya, tetapi setelah jadi gantian rakyat yang mencium tangan mereka.

Negara kita adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem ini dinilai paling baik dibanding sistem pemerintahan lain yang pernah diterapkan di sini. Demokrasi adalah sebuah sistem yang mengatur kekuasaan dilakukan bersama, oleh banyak orang sehingga tidak terjadi penguasaan mutlak oleh satu pihak karena pihak satu dengan yang lain saling mengawasi sehingga terjadi keadilan untuk bersama. Dengan demokrasi maka seluruh aset negara digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Sebaliknya penguasaan atas politik yang dikuasai oleh segelintir orang disebut oligarki. Oligarki sebagaimana diungkapkan oleh Winters via Ridha (Ridha, 2020) adalah politik yang dijalankan oleh kalangan kaya, yakni sang oligark, untuk mempertahankan kekayaan mereka secara aktif melalui kekuasaan negara. Oligarki adalah mempertahankan sebuah praktik mempertahankan kekuasaan.

Demokrasi yang bercita-cita mulia tadi menjadi tidak berjalan karena tersandera oleh oligarki. Oligark menyusup dalam sistem demokrasi sehingga demokrasi yang seharusnya sistem yang dijalankan secara bersama menjadi sebuah sistem yang dijalankan oleh segelintir orang saja dan untuk kepentingan segelintir orang saja. Dengan dipegangnya sebuah sistem maka akses untuk menguasai sumber ekonomi juga terbuka.

Disampaikan oleh (Robet, 2020) bahwa demokrasi secara generik adalah pemerintahan oleh orang banyak atau pengambilan keputusan politik berdasarkan keputusan orang banyak. Kemudian politik adalah instrumen sekaligus praktik yang digunakan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan orang banyak tersebut. Dalam hal ini ekonomi harusnya adalah sebuah cara pemenuhan kesejahteraan. Kapitalisme mengubah tatanan ini dengan menjadikan ekonomi sebagai pusat dan menjadikan politik sebagai budaknya. Banyak cara yang dilakukan untuk menguasai sistem politik oleh para oligark. Misalnya dengan memodali para calon dan menyuap pemilih. Nantinya para calon yang kemudian menjadi pemimpin baik tingkat desa sampai pusat ini akan memberi akses ekonomi kepada mereka misal memegang proyek tertentu. Dalam politik yang membutuhkan ongkos yang besar memang keberadaan pemilik modal sangatlah diperlukan. Mereka selalu mendapatkan tempat di partai politik.

Politik uang sudah lumrah terjadi pada setiap suksesi kepemimpinan. Orang menyebut ini serangan fajar karena biasanya diedarkan pada malam hari atau pagi hari sebelum hari H pencoblosan. Disampaikan oleh (Ananingsih, 2016) Praktik politik uang (money politic) termasuk dalam pelanggaran tindak pidana pemilihan termasuk di Pilkada serentak 2015. Tindak pidana ini seringkali terjadi tetapi sulit untuk diproses karena tidak adanya norma sanksi pidana.

Cara lain selain memodali para calon dan membeli suara pemilih yang dilakukan oleh para oligark agar tetap eksis adalah dengan penguasaan atas media dan partai politik. Hal ini disampaikan oleh (Ridha, 2020). Hal ini bisa disaksikan dalam perpolitikan Indonesia mutakhir, para politikus sekaligus konglomerat, dan sekaligus adalah pemilik media.

Penguasaan atas media sangat penting karena dengan menguasai media maka menguasai pula opini publik. Dengan pemberitaan yang terus menerus maka pikiran massa diharapkan bisa terkontrol. Fungsi media adalah menyebarkan, mempopulerkan seorang



tokoh bisa dilakukan dengan penguasaan atas media. Dampak buruknya adalah media yang seharusnya menjadi kontrol di dalam negara demokrasi menjadi tidak bisa berfungsi dengan baik. Kebenaran yang disajikan oleh media menjadi kebenaran dari satu sisi karena ada sisi yang lain yang ditutup-tutupi. Sebagai contoh, pada pemilu periode lalu media di bawah penguasaan Hary Tanoë dan Aburizal Bakrie akan berpihak pada calon presiden Prabowo dan Media seperti Metro TV akan berpihak pada pemberitaan Jokowi. Tentang netralitas media telah diteliti oleh Emmy Poentarie dengan judul *Komparasi Kebenaran, Relevansi, Keseimbangan Dan Netralitas dalam pemberitaan (Studi Konten Analisis Terkait Pemberitaan Pemilu Presiden 2014 di Harian Kompas dan Koran Sindo)*. (Poentarie, 2015). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Kompas memiliki tingkat kebenaran yang lebih dibanding koran Sindo, Kompas lebih menjaga faktualitas sebaliknya Sindo lebih sensasional, kentang keberimbangan, kedua koran ini sama, kedua koran tidak berimbang karena hanya menampilkan berita hanya dari satu sisi, tentang porsi pemberitaan Kompas lebih berimbang dibanding Sindo yang lebih cenderung memberitakan Prabowo-Hatta.

Kedua adalah penguasaan atas partai politik karena dari partai politik inilah segala keputusan politik praktis dijalankan. Dengan menguasai kedua hal ini maka oligark menguasai perpolitikan dan menjadikan dunia politik sebagai pasar yang transaksional sebagaimana disampaikan oleh Robet. (Robet, 2020).

Penelitian ini hendak melacak skema oligarki dalam struktur cerita pendek yang terbit di Indonesia. Secara spesifik akan melihat bagaimana posisi perempuan dalam skema tersebut. Jika objek formal penelitian ini adalah oligarki meliputi jenis, ciri, dan unsur oligarki, maka objek material cerpen ini adalah dua cerita pendek. Pertama, Cerpen berjudul “Rumah Amplop” karya Damhuri Muhammad (Muhammad, 2013) dan cerpen berjudul “Hawa Panas” karya Silvester Petara Hurit (Hurit, 2022).

Sepanjang pencarian yang telah dilakukan penelitian tentang oligarki terhadap karya sastra terutama cerita pendek belum ditemukan. Penelitian ini merujuk penelitian-penelitian terlebih dahulu yang meneliti tentang oligarki terhadap sistem politik dan sistem sosial di Indonesia. Mengapa karya sastra yang ditinjau? Alasannya adalah karena terkadang karya sastra yang sifatnya imajinatif bisa lebih menjangkau lebih mendalam dibanding penelitian yang menggunakan objek nyata karena terhalang oleh data yang diperoleh. Sebagaimana kredonya Seno Gumira Ajidarma, ketika jurnalisme dibungkam maka sastra harus bicara, karena sastra memiliki kekuatan lain untuk mengungkap sebuah fakta. Dengan semangat itulah penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini merujuk penelitian berjudul *Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan di Pilkades Desa Sitimerto Pada tahun 2016*. (Endik Hidayat B. P., 2018). Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa sumber daya material untuk kemenangan kepala desa masih sangat kuat mempengaruhi pemilih. Namun para oligark juga harus menjadi elit karena ada sumber daya lain yang disebut sumber daya non-material. Sumberdaya non-material itu adalah kekuasaan spiritual atau disebut kasekten.

Penelitian lain yang digunakan sebagai rujukan berjudul “Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa; Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri.” (Endik Hidayat B. P., 2018). Penelitian ini menyuguhkan sebuah hasil penelitian berupa pengaruh sumber daya material dan sumber daya non material. Sumber daya material adalah kekuatan politik berupa uang saku, hadiah yang biasanya menjadi sumber kekuatan utama oligark. Sedangkan sumber daya non material berupa kasekten seperti kepemilikan pusaka, ziarah ke makam sesepuh desa, dan berbagai ritual lain. Pada penelitian ini menunjukkan seluruh calon menggunakan sumber material dan non material, akan tetapi pemang dari kontestasi pemilihan kepala desa ini bukanlah yang mengeluarkan sumber



material yang terbanyak sebagaimana yang sudah-sudah terjadi pada pemilihan tingkat nasional hingga tingkat kabupaten. Justru yang menggunakan sumber daya non-material berupa kasekten ini yang memenangkan pemilihan kepala desa.

Penelitian lain yang dirujuk berjudul “Resume Penelitian Perempuan Kepala daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal” (Atika Nur Kusumaningtyas, 2017). Penelitian ini menemukan bahwa hadirnya perempuan dalam panggung politik lokal adalah adanya faktor kekerabatan, selain karena mereka memang juga memiliki nilai dari sisi kecantikan, dikenal oleh masyarakat dan juga berpendidikan tinggi. Para perempuan ini sesuai dua sampel yang digunakan adalah istri atau anak dari penguasa sebelumnya atau anak dari elit yang juga oligark. Mereka mencalonkan istri atau anak adalah untuk melanggengkan kekuasaannya. Dampaknya adalah para perempuan pemimpin ini tidak mampu menjalankan proses demokratisasi secara optimal dan kurang dapat memperjuangkan kepentingan gender karena kekuasaannya masih dalam rongrongan pihak lain.

### **POLA: APA, SIAPA, BAGAIMANA**

Harold D. Laswell dalam (Endik Hidayat B. P., 2018) mendeskripsikan politik siapa dapat apa, kapan, dan bagaimana. Pola ini akan digunakan untuk penelitian ini. Apa dalam penelitian ini adalah oligarki. Oligarki sebagaimana tadi telah dijelaskan di awal adalah sebuah sistem politik yang dikuasai oleh segelintir orang. Konsep oligarki Winters, Robinson, dan Hafiz, bahwa oligarki adalah politik pertahanan kekayaan di antara para oligark. Jika merujuk pada pola oligarki pada pedesaan Jawa (Endik Hidayat B. P., 2018) maka aktor itu terdiri atas (1) dinasti penguasa lama, mantan-mantan kepala desa yang menguasai tanah dan (2) elit baru yaitu pengusaha, pedagang, dan birokrat.

Memahami ‘siapa’ maka tidak lepas dari struktur dan unsur pada pemerintahan. Di sana ada rakyat. Posisi rakyat adalah penentu suara. Suara rakyat inilah yang diperebutkan sehingga seseorang akan terpilih menjadi kepala pemerintahan baik tingkat nasional maupun desa.

Unsur ‘siapa’ yang lain yang juga patut dipahami adalah elit dan oligark. Antara elit dan oligark memiliki perbedaan pada sumber kekuasaannya. Jika oligark sumber kekuatan utamanya adalah sumber daya material sedangkan elit bisa yang lainnya. Seorang individu menurut (Winters, 2011) kekuasaannya akan diukur dari kepemilikan berikut: hak politik formal, jabatan resmi, kuasa pemaksaan, kekuatan mobilsasi, kekuasaan material. Sumber kekuasaan satu hingga empat adalah dikenal sebagai politik elit, sedangkan yang terakhir adalah oligark.

Sedangkan Iberamsjah (2002: 75) via (Endik Hidayat B. P., 2018) mengategorikan elit menjadi lima; pertama adalah elit agama, kedua elti birokrasi, ketiga eliti cendikiawan, keempat elit ekonomi, dan terakhir elit jawara. Yang terakhir membangun kekuasaan melalui ilmu bela diri dan kebatinan.

Untuk menjawab “bagaimana” maka perlu diketengahkan pola operasionalisasi oligarki paska orde baru. Berikut ini disampaikan oleh (Hafiz, 2010) tentang pola-pola operasionalisasi oligarki. Pertama, jejaring kekuasaan oligarki bersifat predatoris yang menggunakan kekuasaan dan institusi negara untuk akumulasi kekayaan dan kekuasaan individu. Kedua, koalisi yang cair karena pragmatisme kepentingan. Perebutan kepentingan menjadi sumber koalisi dan konflik oleh para elit. Ketiga, terjadi jaringan patronase antara pejabat pemerintahan, pengusaha lokal, organisasi preman, dan aparat keamanan. Keempat, penggunaan politik uang dalam perebutan sumber daya publik. Kelima, penggunaan kekuatan non negara (organisasi preman) untuk mengamankan kepentingan ekonomi politik. Keenam, lemahnya kekuatan civil society di luar jejaring oligarki.



Untuk melengkapi perangkat pembahasan tentang oligarki akan juga disebutkan jenis-jenis oligarki. Bentuk-bentuk oligarki sebagaimana disampaikan oleh (Ridha, 2020) meliputi oligarki perang, oligarki berkuasa, oligarki sultanistik, dan oligarki sipil. Indonesia pada era orde baru adalah contoh oligarki sultanistik dengan ciri penggunaan alat kekerasan didominasi oleh satu orang. Pada jenis oligarki ini relasi patron-klien sangat lumrah. Sementara itu oligarki sipil adalah gambaran Indonesia pasca reformasi dimana kekuasaan dikendalikan oleh gabungan oligark.

### **MEMAHAMI CERITA PENDEK DALAM KONTEKS OLIGARKI**

Sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa objek material penelitian ini adalah dua cerita pendek berjudul “Hawa Panas” (Hurit, 2022) dan “Rumah Amplop” (Muhammad, 2013). Pada tahap awal akan dibahas tentang struktur ceritanya, setelah itu akan dibaca cerita tersebut dengan melihat sisi apa, siapa, dan bagaimana oligarki dijalankan. Baru pada tahap akhir akan juga dilihat posisi perempuan dalam masing-masing cerita. Apakah perempuan berada pada dalam lingkaran oligarki sebagaimana penelitian (Atika Nur Kusumaningtyas, 2017) atau justru perempuan menjadi korban?

#### **Cerpen “Hawa Panas”**

“Hawa Panas” adalah sebuah cerita pendek yang menggambarkan tentang suasana desa yang gerah dan panas. Panas bisa diartikan bukan hanya suhu udara tetapi suasana batin yang diakibatkan oleh sebuah proses politik yang terjadi dimana rakyat menjadi korban atas kerjasama seorang tengkulak dengan penguasa birokrasi yang rakus dan otoriter.

Cerita dimulai dengan mengenalkan tokoh bernama Miten. Ia adalah perantaraan dari kota. Dia pulang ingin menyelesaikan permasalahan di desa. Pada saat itu harga hasil perkebunan seperti mente, kopra sangat rendah sehingga penduduk jatuh miskin. Miten datang dengan “ajimat” ingin mengabdikan dan melayani, sebagaimana calon-calon pemimpin lainnya. Kata Miten, “Sungguh saya tidak tenang tidur, tak enak makan melihat beratnya hidup saudara-saudara sendiri, orangtua, dan semua kakak-adik, di tanah kelahiranku ini. Maka saya pulang untuk bikin harga mente lebih baik, harga kelapa dan kopra lebih pantas.”

Warga desa yang lugu gampang percaya dengan apa yang disampaikan oleh Miten. Apalagi Miten datang dengan penampilan mentereng. Ia membawa mobil pinjaman dari Baba Cung. Warga mengira bahwa Miten telah selesai pada urusan perut.

Apa awal cerpen ini sudah dikenalkan dua tokoh yaitu Miten, Baba Cung, dan Warga. Warga adalah pemilik kedaulatan, suaranya dibutuhkan untuk mengukuhkan legitimasi. Sedangkan Miten adalah orang suruhan Baba Cung. Ia ditanam untuk berperan dan terjun di masyarakat. Untuk itu Baba Cung seorang pemilik gudang kopra memberi modal agar tampilan Miten meyakinkan. Tentu saja nantinya modal dari Baba Cung ini akan ditagih dalam bentuk yang lain.

Konsep oligarki adalah melanggengkan kekuasaan dan kekayaan. Sistem demokrasi dirombak sedemikian rupa sehingga hanya menjadi kepemilikan tunggal sehingga pengawasan terhadap pemerintahan menjadi lemah. Untuk itu dirombaklah kepengurusan desa. Seminggu setelah dilantik Miten mengangkat sepupunya menjadi kepala Badan Usaha Milik Negara (Bumdes), tiga bulan berikutnya ia mengganti bendahara desa dengan istri ketua tim pemenangannya. Posisi-posisi kunci telah ia kuasai. Dengan alasan kemajuan desa ia memaksa rakyat menjual hasil koprasnya kepada Bumdes, dan Bumdes menjualnya kepada Baba Cung. Terjadi sistem monopoli karena pembeli lain tidak bisa masuk. Sistem monopoli



ini membuat rakyat menderita, mereka terhimpit hutang. Pada saat seperti ini Miten menawarkan pinjaman berbunga yang pada akhirnya membuat rakyat kehilangan tanahnya.

Miten juga mengendalikan elit yang lain, dalam hal ini ketua adat. Ketua adat dia kendalikan dan dipaksa memenuhi segala keinginannya dengan cara diberi amplop.

Baba Cung menguasai konteiner tol laut berkat kontribusunya sebagai penyandang dana terbesar dari pemilukada yang lalu. Dia bermain untuk tiga pasangan calon. Prinsipnya tabur di awal. Tuainya selama lima tahun. Jauh lebih besar untungnya. Lima tahun berikut baru bermain lagi. Bagi Baba Cung tak perlu jadi bupati atau anggota DPRD. Yang penting bisa mengendalikan bupati dan pejabat-pejabatnya yang mata duitan itu. (Hurit, 2022)

Dari kutipan diatas maka kita dapat melihat posisi Baba Cung dalam struktur politik. Ia adalah seorang elit ekonomi yang sekaligus seorang oligark. Ia menggunakan sumber daya material untuk mengendalikan sistem politik untuk keperluan dirinya. Sedangkan Miten yang mulanya adalah elit birokrasi karena kekayaan yang dimilikinya mulai juga bermain menjadi elti ekonomi dan menjadi oligark. Ia menggunakan pola yang sama dengan yang dilakukan oleh Baba Cung. Pada pemilukada ia main di tiga kaki, ia merelakan rumahnya sebagai sekretariat paslon A, sedangkan rukonya digunakan sebagai posko pemenangan paslon no urut B, dan mobilnya digunakan oleh paslon no urut C. Miten juga terhubung dengan anggota-anggota DPRD kabupaten. Semakin hari posisi Miten semakin kuat dan tidak ada seorangpun yang berani kepadanya.

Sampai kemudian datanglah Markus, seorang mantan aktivis mahasiswa. Ia pulang kampung dan mengkritisi kebijakan Miten yang tidak pro rakyat. Ia juga mengkritisi Pastor paroki yang menurutnya cenderung cari aman dan tidak menyuarakan suara kenabian. Markus bisa disebut elit cendekiawan yang dengan pengetahuannya mengkritisi kebijakan Miten. Masyarakat yang sudah dilemahkan oleh Miten. Sedangkan pastor paroki dapat disebut elit agama.

Akhirnya Markus dapat dikalahkan oleh Miten dengan cara dijebak. Miten menyuruh seorang perempuan pelacur untuk mendekati Markus. Markus terjebak dan diambil gambar video saat berdua di dalam kamar. Foto itu disebar dan tamatlah perjuangan Markus di desanya. Miten telah menaruh orang-orang untuk mempengaruhi ketua-ketua adat agar Markus dihukum berat. Sehari kemudian Pastor Paroki datang ke rumah Miten untuk memberikan dukungan bagi pencalonannya kembali pada pilkades berikutnya. Atas dukungan itu Miten memesan patung bunda maria dan membangun gua. Pada saat peresmian Miten disambut dengan upacara adat, dikalungi bunga. Saat peresmian itu Pastor berpidato bahwa Tuhan bekerja melalui kepala desa Miten ini untuk itu warga harus mendoakannya.

Miten telah menguasai seluruh sumber kekuatan individu seorang pemimpin yaitu hak politik formal, jabatan resmi, kuasa paksaan, kekuatan mobilisasi, dan sumber daya material. Miten juga telah menaklukan seluruh elit baik elit agama, elit birokrasi, elit cendekiawan, dan elit jawara.

Pola operasional oligarki dijalankan dengan baik oleh Miten. Ia predatoris, rakyat dihisap sedemikian rupa. Terjadi koalisi yang cair sesuai kepentingan, bahkan Miten main pada tiga kaki pada pemilukada. Pada kasus ini terlihat sekali terjadi relasi patronase antara penguasa dan elit yang lain, dan ia juga menjalankan politik uang untuk melanggengkan kekuasaannya dan terakhir tentang penggunaan kekuatan preman tidak terungkap jelas, tetapi



dia menggunakan orang-orang untuk mempengaruhi ketua adat, bentuk pengaruhnya kekerasan atau tidak, tidak dijelaskan.

Lalu dimana perempuan berada dalam oligarki itu? Ia hadir hanya sebagai alat. Perempuan hadir hanya sebagai pelacur dan digunakan untuk menjebak elit cendekiawan yang hadir dan mengancam kekuasaan oligark. Hal ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh (Atika Nur Kusumaningtyas, 2017). Di sana perempuan berkedudukan cukup penting. Ia menjadi pemimpin meskipun kepemimpinannya adalah kelanjutan dari suami atau orangtua yang sebelumnya memimpin.

### **Cerpen “Rumah Amplop”**

Dari judulnya saja sudah terlihat arah dari cerita ini. Amplop adalah simbolisasi uang, maka rumah amplop adalah rumah uang. Terkait dengan penelitian ini adalah oligarki, sebuah politik pertahanan kekuasaan dan kekayaan. Sebuah pertahanan kekayaan melalui jalan politik atau masuk kedalam sistem demokrasi dan menjadikannya sebagai pasar.

Cerpen ini bercerita tentang tokoh bernama Sukra. Sukra mulanya adalah seorang birokrat. Birokrat masuk dalam jajaran elit bersama elit yang lain seperti elit agama, cendekiawan, ekonomi, dan jawara. Sebagai birokrat Sukra memiliki sumber kekuasaan jabatan resmi dan kuasa paksaan. Ia berada pada pos perizinan proyek, sehingga siapa saja yang tidak mengirimkan amplop padanya maka proyeknya tidak akan mendapatkan izin, sebagaimana kutipan berikut: “Barangsiapa yang dengan sadar dan sengaja menaruh uang alakadar di amplop yang bakal diantar ke rumah kami, akan membuat papa jadi murka. Urusannya pasti panjang, dan tentu akan dipersulit. Izin proyek bakal terganjal.” (Muhammad, 2013).

Memulai sebagai elit demokrat kemudian Sukra tumbuh menjadi elit ekonomi. Uang yang dia kumpulkan saat menjadi birokrat lalu ia gunakan sebagai modal untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Sukra melakukan apa saja untuk mencapai ambisi yang diinginkannya. Hal tersebut ditunjukkan dalam cerpen berikut ini; “Dulu, para pengirim amplop diam-diam menyebut papa sebagai manusia pemakan segala, kini papa sering digunjingkan teman-teman arisan mama sebagai penjahat pemanjat segalanya....”

Sukra mengoprasikan uangnya demi meraih jabatannya dan kemudian menumbuhkan kekayaan melalui jabatan sebagai kepala daerah itu. Rakyat sebagai konsituen dirayu dengan berbagai cara, hal menjadikan citra Sukra melambung tinggi.

Sudah tak terhitung banyaknya bantuan dan sumbangan yang diberikan papa untuk orang-orang di kampung. Sekolah dibangun, masjid direnovasi, jalan diperbaiki, hingga nama papa begitu harum. Dermawan, pemurah, dan baik hati. Meski berkarir di kota, menjadi orang besar dan kaya-raya, papa tak lupa pada tanah asal. (Muhammad, 2013).

Para elit kampung secara otomatis akan takluk oleh tindakan yang dilakukan Sukra. Paling tidak Sukra telah memegang suara publik sehingga jika ada salah satu elit yang berbicara miring terhadap Sukra maka elit itu sendiri yang akan diserang oleh rakyat. Dengan dibangunnya masjid maka elit agama akan menilai sukra baik terhadap kalangan agama, dengan dibangunnya sekolah maka elit cendekiawan juga akan memujinya. Elit adat dalam hal ini disampaikan oleh simpatisan dan tim sukses memberi syarat ringan untuk mengukuhkan Sukra sebagai putra daerah ia disuruh kawin dengan perempuan daerah. Hal itu juga dilakukan oleh Sukra, ia mengawini seorang gadis bernama Nur Jannah, gadis seusia anaknya. Ia menceraikan istri pertamanya.



Pola operasionalisasi oligarki dalam cerpen ini bersifat predatoris yang menggunakan kekuasaan dan institusi negara untuk akumulasi kekayaan. Dengan kekuasaan yang dimilikinya, Sukra memaksa orang untuk menyetor sejumlah uang kepada dirinya. Ia juga mengatur pembangunan jalan. Demi mendapatkan uang banyak, ia menyuruh pemborong untuk mengurugi kualitas proyek, seperti mengurugi ketebalan aspal, dan sejenisnya. Tentang koalisi dengan siapa dilakukan tidak begitu diceritakan dalam cerpen ini. Yang jelas, ia menggunakan politik uang untuk mendapatkan suara dan kekuatan civil society di luar oligarki lemah.

Lalu dimanakah perempuan. Ada dua perempuan di dalam cerpen ini. Pertama adalah Reina, istri pertama Sukra yang kemudian diceritakan menjelang Sukra mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Kedua adalah Nur Jannah, istri kedua yang dijadikan syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Reina adalah istri pertama yang mulanya ikut menikmati rumah amplop yang pertama. Diceritakan Reina ini pada waktu itu selalu minta mobil baru setiap Sukra mendapatkan proyek baru. Berikut ini kutipannya:

Setiap kali papa terlibat dalam proyek pembangunan jalan, mama akan merengek-rengok manja minta hadiah mobil mewah keluaran terbaru. Dan, atas nama cintanya, diam-diam papa akan memerintahkan pemborong untuk menipiskan aspal yang mestinya tebal, memendekkan jalan yang seharusnya panjang, merapuhkan yang semestinya kokoh, dan semua hasil penyuntatan anggaran itu ia gunakan untuk membeli mobil mewah permintaan mama. (Muhammad, 2013).

Pada akhirnya Reina memilih diceritakan daripada dimadu. Anehnya Reina tidak terpuuk atas kejadian itu. Ia sudah bosan hidup dengan cara begitu dan disumpai oleh banyak orang. Nur Jannah adalah istri kedua yang mendampingi Sukra menjadi kepala daerah. Bersama Nur Jannah, Sukra membangun rumah amplop kedua.

## **Simpulan**

Terdapat sistem oligarki dalam dua cerita pendek yang diteliti. Cerpen pertama, “Hawa Panas” menunjukkan adanya elit agama, elit cendekiawan, elit ekonomi. Seluruh elit ini kalah dengan seorang tokoh bernama Baba Cung, seorang oligark yang bermodalkan sumber daya material mengendalikan elit yang lain yang bermodalkan hak politik formal, jabatan resmi, keilmuan, dan otoritas agama. Bab Lung menggunakan Miten sebagai aktor untuk menjalankan misinya, meskipun pada perkembangannya Miten juga tumbuh sebagai oligark baru. Pola operasionalisasi predatoris sehingga harikay menjadi korban. Aturan dibuat sedemikian rupa sehingga rakyat terpaksa menjual hasil taninya kepada Bumdes. Terjadinya sistem monopoli yang merugikan rakyat.

Cerpen kedua “Rumah Kedua” menunjukkan perkembangan oligark. Seorang Sukra yang mulanya adalah elit birokrat biasa, menjadi elit ekonomi, dan kemudian menjadi oligark. Pola operasionalisasi oligarki adalah predatoris dan menggunakan uangnya untuk mempengaruhi persepsi rakyat. Pembangunan masjid dan sekolah yang dilakukannya tiada lain adalah untuk merebut persepsi elit lain seperti elit agama dan elit

Posisi perempuan dalam cerpen “Hawa Panas” hanyalah alat bagi oligarki demi melanggengkan sistem oligarkinya. Sedangkan dalam cerpen “Rumah Amplop”, perempuan Reina adalah korban oligarki, dan Nur Jannah adalah alat demi meluaskan penguasaan kekuasaan dan kekayaan bagi oligark, Sukra.



Baik dalam dunia perpolitikan Indonesia maupun di dalam cerpen, dalam sistem oligarki perempuan tidak menjadi subjek utama oligarki. Dalam perpolitikan Indonesia, perempuan adalah pelanjut atau kepanjangan tangan bagi orangtua atau suami yang aktor utamanya, sedangkan dalam cerpen bertema oligarki, perempuan hanya sebagai alat bagi sistem oligarki. Perempuan menjadi pelanjut atau kepanjangan tangan bukannya tanpa nilai, seseorang dipilih menjadi pelanjut tentu saja karena dia memiliki nilai baik karena kemampuan juga popularitasnya.

### Daftar Pustaka

- Ananingsih, S. W. (2016). Tantangan dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik. *Masalah - Masalah Hukum*, 49.
- Atika Nur Kusumaningtyas, K. H. (2017). Resume Penelitian Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 243-264.
- Endik Hidayat, B. P. (2018). "Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepada Desa/; Kekalahan Incumbent pada Pilkada Tanjung Kabupaten Kediri.". *Jurnal Politik*, 53-86.
- Endik Hidayat, B. P. (2018). Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan di Pilkada Desa Sitimerto pada tahun 2016. *Jurnal Sospol*, 124-151.
- Hafiz, V. R. (2010). *Dinamika kekuasaan: ekonomi politik Indonesia Pasca Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Hurit, S. P. (2022, Desember 11). Hawa Panas. *Kompas*.
- Muhammad, D. (2013, Mei 19). Rumah Amplop. *Jawa Pos*.
- Poentarie, E. (2015). Komparasi Kebenaran, Relevansi, Keseimbangan Dan Netralitas dalam pemberitaan (Studi Konten Analisis Terkait Pemberitaan Pemilu Presiden 2014 di Harian Kompas dan Koran Sindo) . *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 1-13.
- Ridha, M. (2020). Kekuasaan Oligarki pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki. In b. M. dkk, *Oligarki Teori dan Kritik* (p. 4). Tanggrang Selatan: Marjin Kiri.
- Robet, R. (2020). Oligarki, Politik, dan "Res Politika". In C. h. Abdil mughis Mudhoffir, *Oligarki Teri dan Kritik* (p. 187). Tangrang: Marjin Kiri.
- Rully. (2018). Efektifitas Iklan Negatif Di Media Sosial. *Jurnal Lontar*, 69-79.
- Winters, J. A. (2011). *Oligarki*. Jakarta: PT. gramedia Pustaka Utama.